

PENERAPAN TEORI *CULPA* TERHADAP KASUS KEBAKARAN
KORSLETING INSTALASI LISTRIK DI KECAMATAN LUMBIS
KABUPATEN NUNUKAN



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

Andi Asti Sakinah Cahyani

10400116032

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Asti Sakina Cahyani
Nim : 10400116032
Tempat/Tgl. Lahir : Tobunne, 18 April 1998
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : JL. Kampung Baru (Kecamatan Sei Menggaris, Nunukan)
Judul : **Penerapan Teori *Culpa* Terhadap Kasus Kebakaran Korsleting
Instalasi Listrik di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Nunukan, 04 Juli 2020

Penyusun,

Andi Asti Sakina Cahyani
NIM : 10400116032

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Penerapan Teori *Culpa* Terhadap Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan**” yang disusun oleh Andi Asti Sakina Cahyani, Nim 10400116032, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Nunukan, 2 Juli 2020 M
24 Dzulqaidah 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag. (.....)	
Sekretaris	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.ag. (.....)	
Munaqisy I	: Istiqamah, S.H., M.H (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Andi Syafrani, S.H., M.H. (.....)	
Pembimbing I	: Dr. Jumadi, S.H., M.H. (.....)	
Pembimbing II	: Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. (.....)	

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar


Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
NIP. 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbalaalamiin.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak tertepi, doa yang tak pernah putus dari kedua orang tuaku tercinta, Andi Muhammad Takwa dan Ibuku Andi Nurmayanti, yang senantiasa memberikan penulis motivasi, nasihat, serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Dan beserta keluarga penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah “Penerapan Teori *Culpa* Terhadap Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya sangat hormati :

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis MA Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, M.H Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan orang tua penulis di jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan penuhcandaan.
4. Bapak Dr.Jumadi, S.H., M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah sekaligus Pembimbing I yang perhatian dan senantiasa membimbing dengan sabar.
5. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin S.H.,M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Pembimbing II yang perhatian dan senantiasasabar.
6. Ibu Istiqamah, S.H.,M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Penguji I terima kasih banyak.
7. Ibu Dr. Andi Syafriani S.H.,M.H. sebagai Dosen Fakultas Syariah sekaligus Penguji II terima kasih banyak atas perhatian dan masukan- masukannya.
8. Seluruh dosen, pejabat dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada umumnya dan dosen jurusan Ilmu Hukum pada khususnya yang senantiasa mengajarpenulis.
9. Seluruh Masyarakat dan Staf kantor Kecamatan Lumbis yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung selamapenelitian.
10. Seluruh teman-teman yang kerap kali membantu di kelas Ilmu Hukum A angkatan 2016, terkhusus, Iot Wiwik Harpika Sari, Irdyanti, Nadya Oktaviani bahar, Nurindah sari Putri Bakhtiat, Muhammad Iswhan dan masih banyak lagi.
11. Senior-senior yang membantu dalam proses perjuangan, memberikan

bantuan, dukungan yang tiada hentinya dan untuk semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, serta teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum UINAM, serta teman-teman PPL Pengadilan Negeri Bantaeng dan KKN Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng angkatan62.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya. Mudah- mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan juga kepada penulis sendiri, serta umumnya bagi kita semua.

NUNUKAN, 12 Juni 2020

ANDI ASTI SAKINA CAHYANI

NIM : 10400116032



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	14
A. Tindak Pidana.....	14
1. Definisi Hukum Pidana.....	14
2. Pengertian Tindak Pidana.....	19
3. Penggolongan Tindak Pidana.....	25
4. Sanksi Pidana.....	28
B. Kesalahan.....	30
C. Teori Culpae.....	34
D. Korsleting	42
E. Metode Pengendalian Kebakaran.....	43

BAB III	METODE PENELITIAN.....	41
A.	Jenis Penelitian.....	41
B.	Lokasi Penelitian.....	41
C.	Sumber Data.....	42
D.	Metode Pengumpulan Data.....	42
E.	Instrument Penelitian.....	42
F.	Tekhnik Pengolahn Data.....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A.	Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	45
B.	Data Kebakaran yang Terjadi di Kec. Lumbis.....	47
a.	Data Kebakaran Dalam Kerugian Kecil.....	47
b.	Data Kebakaran Dalam Kerugian Besar.....	48
C.	Hasil Penelitian.....	52
a.	Penerapan Teori Culp Dalam Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kec. Lumbis Kab. Nunukan.....	53
b.	Pertimbangan Kepolisian Dalam Dalam Memproses Perkara Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kec. Lumbis Kab. Nunukan.....	60

BAB V	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Implikasi Penelitian.....	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	68
	LAMPIRAN.....	71



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :rangkap bahasa Arab

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathahdan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ			

	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u
--	-----------------------	----	---------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (ل) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an(dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.=

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR)

ABSTARAK

Nama : Andi Asti Sakina Cahyani
NIM : 10400116032
Fak/Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Teori Culpaa Terhadap Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik Di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan

Skripsi ini berjudul Penerapan Teori *culpa* Terhadap Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik ditinjau dari Aspek Hukum Pidana yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan teori *culpa* di kec.Lumbis kab.Nunukan dan bagaimana tanggapan kepolisian di Kec.Lumbis Kab.Nunukan dalam menanggulangi *culpa* yang terjadi di Kec.Lumbis Kab.Nunukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi . sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan tehnik pengolahan data dan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan teori *culpa* di Kec.Lumbis Kab.Nunukan masih sangat awam dimata masyarakat. Karena kelalaian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tidak ditindak lanjuti oleh warga sekitar mereka lebih memilih diam dan tidak memperpanjang masalah hal ini sebenarnya salah kerana kelalaian atau *culpa* sebenarnya merupakan kesalahan yang bisa dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Walaupun hal ini merupakan kesalahan yang tidak sengaja tapi ini sudah termaksud kelalaian, kelalaian yang dimaksud disini adalah lalai dalam menjaga sesuatu padahal warga sekitar rumah pelaku sering mengingatkan mengenai listrik tersebut tetapi tidak diindahkan oleh pelaku. Mengenai tanggapan kepolisian dalam menangani hal tersebut juga tidak maksimal karena warga yang memilih tidak memperpanjang masalah .

Padahal kebakaran yang terjadi di Kec.Lumbis Kab.Nunukan merupakan kebakaran yang cukup besar karena memakan 22 rumah warga Mansalong dengan menghabiskan kurang lebih 7 milyar kerugian. Dengan kejadian ini banyak kecamatan tetangga yang memberi bantuan seperti Kec.Sebuku, Kec.Seimenggaris terutama kota Nunukan. Tetapi sayangnya masalah ini ditutup begitu saja dengan penanganan Mediasi.

Implikasi Penulis untuk masyarakat dan para aparat hukum dalam mengenai kasus ini adalah masyarakat harus lebih peka dan mengerti akan hukum karena tindak pidana tidak akan ada tanpa adanya Undang-Undang yang mengaturnya begitupun untuk para aparat hukum yang menangani kasus ini untuk lebih tegas dalam menindak lanjut mengenai kasus seperti ini dikemudian hari karena tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang sangat jelas asal usulnya dan jelas sebab akibatnya.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Culpa, Kebakaran*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang dimana segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat maupun individu, itu semua diatur oleh hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka dari itu untuk menjalankan suatu Negara dan untuk melindungi Hak asasi Manusia harus berdasarkan hukum, karena segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia sudah ada hukum yang mengaturnya sehingga perilaku masyarakat dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).¹

Dalam rangka mewujudkan negara hukum salah satu yang sangat diperlukan adalah perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan masyarakat Indonesia dengan melalui peraturan perundang-undangan tanpa mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia hukum nasional yang merupakan hukum peninggalan dari Belanda dalam bentuk kodifikasi sudah disesuaikan dengan jati diri bangsa Indonesia. Hukum nasional merupakan hukum yang dipegang teguh oleh bangsa

¹ Muh Amiruddin, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas”, *Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 5, no 1 (Juni 2018): hal.1.

Indonesia hal ini tentunya sesuai dengan pernyataan Indonesia dalam konstitusi yang menyatakan diri sebagai Negara hukum. Koneskuensinya bahwa setiap hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berlandaskan dengan hukum.

Sesungguhnya Hukum Nasional adalah hukum modern dengan sekalian karakteristiknya. Hukum nasional adalah hukum tertulis, diwakili oleh personel yang pofesional, didukung oleh kekuasaan monopolistic untuk mengatur, dan tidak ada kekuasaan politik lain yang boleh menandinginya.² Hukum nasional terdiri dari beberapa bidang ilmu yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi dan lain sebagainya. Hukum pidana merupakan salah satu bidang ilmu yang membahas tentang perbuatan apa yag tidak boleh dilakukan dan didalamnya terdapat sanksi sebagai imbalan dari perbuatan pidana. Hukum pidana bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hukum pidana.

Hukum pidana atau hukum publik pada hakikatnya mengatur tentang nilai dan kaidah-kaidah tentang suatu perbuatan yang menyimpang dari segala aturan hukum. Hukum pidana terbagi atas hukum pidana objektif, hukum pidana subjektif, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus . Hukum pidana objektif kembali dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil yaitu seperangkat aturan yang berisi tentang perbuatan yang pantang dan tidak boleh dilakukan. Hal ini termuat dalam aturan yang telah

² Ahkam Jayadi, "Membuka Tabir Kesadaran Hukum", *Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 4, no 2 (Desember 2017):h.13.

dikodifikasi yaitu KUHPidana. Selain itu, hukum pidana formil yaitu serangkaian aturan yang mengatur tentang tata cara beracara dalam hukum pidana, dan sebagai penegakan hukum pidana formil. Hal ini juga termuat di dalam aturan yang telah dikodifikasi yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan maksud dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dapat kita lihat dari segi kata umum dan khusus itu sendiri, hukum pidana umum dibuat dengan sengaja untuk diberlakukan pada semua orang pada umumnya sedangkan hukum pidana khusus dibuat dengan sengaja untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja seperti militer dan perangkat negara lainnya, hukum pidana khusus juga hanya membahas masalah-masalah tindak pidana diluar KUHPidana misalnya Undang-Undang Tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Perdagangan manusia, dan lainnya.

Hukum pidana memuat asas legalitas sebagai suatu prinsip dalam penegakan hukum pidana tersebut. Asas legalitas adalah salah satu asas yang sangat fundamental didalam hukum pidana. Asas legalitas bermakna bahwa suatu perbuatan tidak boleh dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hal ini termuat di dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana dalam Bahasa hukum aturan ini dikenal dengan '*nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*'. Asas ini menjadi dasar suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Tetapi jika perbuatan telah dilakukan dan kemudian ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka, sanksi yang diberikan adalah aturan yang paling rendah sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).

Pada hakikatnya hukum pidana bertujuan untuk mengatur setiap perbuatan dan tingkah laku manusia agar sesuai dengan nilai dan norma hukum pidana. Sedangkan hukum pidana menurut Hazewinkel Suringa mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.³

Sebelum Indonesia kedatangan bangsa Belanda, Indonesia juga sudah mengenal dan menerapkan yang namanya hukum pidana adat, hukum pidana adat yang tidak tertulis tersebut bersifat lokal dalam artian hukum ini hanya berlaku dan diberdayakan dalam wilayah adat tertentu saja dan tidak berlaku di wilayah adat lainnya.⁴

Penerapan hukum pidana selain berlandaskan pada serangkaian aturan hukum pidana, juga haruslah berdasar pada asas dan teori hukum pidana sebagai pedoman yang paling prinsip dalam memaknai keberlakuan hukum pidana. Asas merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam menjalankan suatu aturan dalam hukum pidana. Selain itu, teori dalam hukum pidana merupakan pedoman yang berlandaskan pemikiran-pemikiran para pakar atau ahli hukum pidana dalam mengkaji sistem hukum pidana yang juga dapat dijadikan sebagai patokan dalam menerapkan hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun

³Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 4.

⁴Zaeni Asyhadie, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2016), Cetakan, ke-II. h. 131.

hukum pidana formil. Teori hukum pidana dibagi menjadi 3 yaitu Teori absolut/retribusi, teori tujuan/relative, teori gabungan, dan teori integratif⁵

Ada banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tetapi ada 4 garis besar yang dapat ditarik yaitu teori-teori yang telah disebutkan diatas. Dalam praktek penerapannya di Indonesia keempat teori tersebut yang sangat dianut di Indonesia adalah teori Gabungan. Teori gabungan ada kaitannya dengan teori relatif, maksud dari teori gabungan ialah adanya pembalasan yang dilakukan oleh yang melakukan tindak pidana dan adanya perlindungan bagi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dengan tidak menjatuhkan hukum lebih berat atau lebih ringan dari tindak pidana yang ia buat, agar tercapainya hukum yang adil.⁶

Menurut Lamintang, di setiap tindakan pidana dalam KUHPidana dibagi atas dua bagian yaitu yang pertama adalah unsur-unsur subyektif. Unsur subyektif pada umumnya melekat pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana termaksud apa yang ada dalam hatinya, sedangkan unsur-unsur obyektif dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang terjadi pada saat itu yang dilakukan oleh yang melakukan tindak pidana yang memang tindakan itu harus dilakukan.⁷

Adapun yang dimaksud dalam unsur-unsur subyektif dari tindak pidana ialah. (1). Tidak kesengajaan atau kesengajaan (*dolus/culpa*) (2). Maksud dari pasal 53 (1) KUHPidana yaitu adanya niat dalam hati sebelum melakukan tindak pidana,

⁵ Muladi. 2002 *Lembaga pidana bersyarat*. Alumni. Bandung.

⁶ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina cipta, 1992), h.37.

⁷ Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,, 1984), h.183.

(3). Berbagai macam maksud seperti yang ada dalam contohnya dalam tindak pidana penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan dan sebagainya, (4). Adanya rasa takut menurut yang ada dalam Pasal 308 KUHPidana , (4). Terlebih dahulu merencanakan contohnya tindak pidana pembunuhan seperti yang ada dalam pasal 340 KUHPidana.

Yang harus ada dalam tindak pidana adalah tentang unsur subyektifnya yaitu masalah tentang kesalahan (*dolus/culpa*). Mengenai perbedaan atau persamaan antara kealpaan (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*) adalah kesengajaan bermakna perbuatan tindak pidana yang berbeda jenis dengan kealpaan, tetapi landasannya sama yaitu (1). perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan ancaman pidana, (2). Mempunyai keinginan untuk bertanggungjawab, (3). Tidak mempunyai alasan pemaaf. Tetapi dalam kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) keduanya memiliki bentuk yang berbeda. Kesengajaan (*dolus*) dalam melakukan kesalahannya mempunyai unsur yang memang ingin melakukan kesalahan atau tidak takut akan sanksi dalam tindak pidana yang sudah di atur, tetapi jika kealpaan (*culpa*) dalam melakukan kesalahannya karena adanya kelalaian dalam tindakannya sehingga melakukan kesalahan.⁸

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360 tentang masalah-masalah kealpaan yaitu :

1. Pasal 359 KUHP :

⁸Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia,2000),h. 89.

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

2. Pasal 360 KUHP :

(1). Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.

(2). Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.⁹

Adapun Undang –Undang tentang kelalaian mengakibatkan kebakaran adalah Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. “¹⁰

⁹Undang-Undang No.1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia Pasal 359 dan 360.

¹⁰Undang-Undang No.1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia Pasal 188.

Dan untuk dipidana dalam pasal ini, perbuatan harus memenuhi 2 unsur :

(1). Karena perbuatannya menimbulkan kebakaran, banjir atau ledakanjadi kesalahan tersebut bukan karena kesengajaan, tapi akibat kelalaian; (2). Karena kesalahannya, muncullah bahaya keseluruhan bagi nyawa, bagi barang orang lainyang ada ditempat atau mengakibatkan orang meninggal. Ini menjelaskan bahwa bagaimanapun kebakaran tersebut dilakukan sengaja maupun tidak disengaja, tetapi karena kelalaiannya atau kealpaan (*culpa*) tetap dituntut pidana dengan pasal 188 KUHP.¹¹

Dalam Al-Quran pun membahas masalah kerusakan akibat kelalaian manusia yang berada pada Surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut:



Artinya :

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dari ayat diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kelalaian yang disebabkan oleh para manusia memberi dampak negatif bagi bumi dan isinya oleh

¹¹Letezia Tobing .” Ulasan lengkap: Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran”, <https://m.hukumonline.com>, 08 Desember 2019

karena itu marilah kita teliti dalam melakukan suatu hal. Karena kelalaian yang kita perbuat akan mendapat impek besar bagi sekitar.

Manusia adalah entitas diri yang padanya melekat sifat-sifat jahat berupa : hawa nafsu, dunia, dan setan bagaimana hawa nafsu itu bekerja dalam memperalat manusia, maka tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali ajaran agama (Islam) . Hal inilah yang tidak banyak kita pahami selama ini.¹²

Di Indonesia kasus kealpaan (*culpa*) sangat pro dan kontra dikalangan masyarakat karena kesalahannya yang tidak disengaja ini membuat masyarakat tidak tahu mengenai siapakah yang berhak disalahkan dalam kasus tindak pidana tersebut. Adapun kasus yang sangat krusial di Kabupaten Nunukan adalah kasus kebakaran yang ada Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan karena sebagian masyarakat masih sangat awam mengenai tindak pidana kealpaan(*Culpa*) tersebut. Dalam realitanya masyarakat yang ada di Kecamatan lumbis kabupaten Nunukan masih awam mengenai Tindak Pidana Culpa atau kelalaian mereka masih belum tahu dengan pasal yang mengatur tindak pidana tersebut .

Mereka merasa apakah kesalahan ini hanya suatu ketidak sengajaan yang pantas dilupakan begitu saja padahal tindak pidana kelalaian ini jelas mengenai hukuman yang dijatuhkan dan berapa dendanya. Disini aparat kepolisian sangat berperan penting mengenai kasus ini.

¹² Jayadi, A. (2017). Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya. *Al-risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 15(2).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas. Maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji serta meneliti permasalahan-permasalahan tersebut dengan judul : PENERAPAN TEORI *CULPA* TERHADAP KASUS KEBAKARAN KORSLETING INSTALASI LISTRIK DI KECAMATAN LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka dapat dideskripsikan pengertiandari kata yang terkait dengan penelitian antara lain :

1. Tindak pidana atau *starbarfeit* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan apabila seseorang melanggarnya maka akan mendapatkan saksi sesuai dengan apa yang ia perbuat, dan atau Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹³
2. Kesalahan atau *schuld* adalah fikiran dan jiwa pelaku sehingga adanya unsur-unsur tindak pidana karena apa yang diperbuat kesalah juga akan menuju kepertanggungjawaban pelaku atas apa diperbuatnya. Kesalahan terbagi dua yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian atau kealpaan (*culpa*)
3. Kelalaian (*culpa*) adalah suatu kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh sipelaku, tindak pidana ini satu level kebawa dari kesengajaan yaitu adanya kelalaian hingga kesalahan yang tidak disengaja itu terjadi.

¹³ Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 35.

4. Korsleting Listrik adalah hal yang terjadi karena hubungan arus pendek listrik yang merusak benda itu, dan bisa menyebabkan kebakaran. Korsleting selalu terjadi karena penyalahgunaan listrik yang tidak sesuai dan bisa juga karena adanya kabel yang terkelupas.

C. Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana “Penerapan Teori Culpa Terhadap Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan”. Agar masalah dalam penelitian ini tidak meluas maka terbagi dalam beberapa sub bagian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan teori *culpa* dalam kasus kebakaran korsleting instalasi listrik di Kec.Lumbis Kab.Nunukan ?
2. Bagaimana pertimbangan kepolisian dalam memproses perkara kasus kebakaran korsleting instalasi listrik di kec. Lumbis kab.Nunukan karena *culpa* ?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan teori *culpa* dalam kasus kebakaran korsleting instalasi listrik di kec. Lumbis kab. Nunukan
- b. Untuk mengetahui pertimbangan kepolisian dalam memproses perkara kasus kebakaran korsleting instalasi listrik di kec. Lumbis kab. Nunukan karena *culpa*

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini kiranya bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya masyarakat kec. Lumbis tentang penerapan teori culpa dalam kasus kebakaran korsleting instalasi listrik dan mengetahui pertimbangan kepolisian mengenai perkara kebakaran korsleting instalasi listrik kec. Lumbis kab. Nunukan.

b. Kegunaan ilmiah

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan ilmu pengetahuan dan sebagai literatur atau referensi serta acuan dalam membuat penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menjadi pelajaran khususnya di bidang hukum pidana.

E. Kajian pustaka

Dalam penelitian ini saya membutuhkan referensi karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian saya yaitu :

1. Penulisan yang dilakukan oleh Muhammad Arnan Arfandi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain” (Analisis Putusan: No.472/pid.B/2015/PN.Mks) Skripsi ini menuliskan

tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian akibat kealpaan atau kelalaian seseorang.

2. Penulisan yang dilakukan oleh Ilham Aniah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara” (Analisis Putusan No. 1508/Pid.B/2012/PN.Mks) Skripsi ini menuliskan bagaimana pihak yang berwenang seperti Kepolisian, Jaksa, dan Hakim dalam menangani kasus kelalaian di Indonesia.
3. Penulisan yang dilakukan oleh Muhammad Mansyur Jayadi yang berjudul “Perancangan Media Edukasi Berbasis *Augmented Reality* Sebagai Petunjuk Instalasi Listrik dan Penggunaan Listrik Pada Perangkat Elektronik Rumah Tangga” Skripsi ini menuliskan keadaan yang menyebabkan kebakaran akibat korsleting listrik bisa terjadi.
4. Penulisan yang dilakukan oleh Suryadi Asri yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang mengakibatkan Kematian Atau Luka-Luka” Skripsi ini menuliskan tentang Undang-Undang tentang tindak pidana kelalaian.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tindak Pidana

1. Definisi hukum pidana

Dalam memberikan pengertian tentang apa itu hukum pidana tidak semudah apa yang dibayangkan sebab, pengertian hukum pidana yang didefinisikan oleh para ahli sangat banyak tersebar diberbagai macam negara, dan semua itu memiliki cara pandang yang sangat berbeda dari berbagai macam sisi. Hal ini sangat berimplikasi pada ruang lingkup dan batasan-batasan hukum pidana. Maka dari itu tidak mengherankan apabila banyak didapatkan berbagai macam devinisi atau cara pandang orang dalam memaknai atau mengartikan apa itu hukum pidana.¹⁴Sedangkan hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu (E. Utrecht, 1961: 12)¹⁵Membahas pidana tidak akan terlepas dari yang namanya hukum pidana, sebab tanpa hukum sudah pasti pidana akan diberlakukan tidak adil oleh penguasa yang memerintah pada saat itu. Harus pula diketahui antara pidana dan hukum pidana makna dan cara mengartikannya berbeda pula. Simons mengartikan “pidana adalah *Heet leed, door de strafwet als gevolg aan de overtranding van de norm verbonden, data an denschuldige bij rechterlijk vonis wordt opgelegd*. Artinya suatu penderitaan yang

¹⁴ Mahrus Ali .*Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2015),hal,1.

¹⁵ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum cetakan kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 21.

oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁶

Pidana sendiri menurut Van Hamel “adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.

Dari cara pandang para ahli sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka perlu kita ketahui bahwa arti pidana itu sendiri hanya suatu penderitaan yang berlaku untuk orang yang bersalah atau melakukan suatu pelanggaran, dalam hal ini kita tidak mendapat apa tujuan dari arti pidana itu sendiri, karena inti dari apa itu pidana hanyalah penderitaan yang dijatuhkan pihak yang berwenang.

Sedangkan mengenai apa itu hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang aturan-aturan apa yang tidak boleh dilakukan , yang disertai dengan adanya pembalasan atau sanksi tertentu sesuai apa yang dilakukan dan berlaku bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Jadi jelas sekali Pada hakikatnya hukum pidana bertujuan untuk mengatur setiap perbuatan dan tingkah laku manusia agar sesuai dengan nilai dan norma hukum pidana. Banyak sekali para ahli yang mengemukakan tentang apa itu hukum pidana diantaranya yaitu :

¹⁶ PAF Lamintang dan Theo lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), HAL, 34.

Hukum pidana menurut Sudarto yaitu “hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok”, yaitu:

a. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana

b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.¹⁷

Definisi yang diuraikan oleh Sudarto termaksud sempit karena hanya mengenai hukum pidana materil di hukum pidana, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diatur oleh hukum pidana beserta pembalasannya atau sanksi yang sudah di atur di hukum pidana itu sendiri.

Menurut Pompe “hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan. Terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa

¹⁷Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2015),hal,3.

pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.¹⁸

Sedangkan hukum pidana menurut Moeljatno yaitu “bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang diberlakukan di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.

Maka dari itu hukum pidana tidak membuat norma hukum sendiri tetapi memang sudah ada norma yang mengatur hukum pidana itu sendiri, sedangkan dalam penaatannya dibuatlah sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarnya untuk mentaati norma tersebut. Norma yang dimaksud disini adalah norma kesusilaan, norma agama, dan lainnya.²⁰

¹⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),hal.22.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002),hal,1,

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Aditya Bakti,1999),hal,92.

Dalam penerapannya pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana materiil dan pidana formil. Adapun pengertian dari pidana materiil dan pidana formil menurut para ahli adalah sebagai berikut :²¹

Wirjono Prodjokoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil yaitu:

Isi hukum pidana adalah :

- a. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana;
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana;
- c. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan;
- d. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

Menurut Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan “hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.” Pengertian Van Bemmelen ini hampir sama dengan pengertian hukum pidana yang

²¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika,2005),hal,2.

artikan oleh Moeljatnon yang mengkategorikan hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.²²

Sedangkan menurut Tirtaamidjaja mengartikan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut :²³

Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana materiil yang didalamnya terdapat apa yang boleh dan tidak boleh dan jika kita melanggarnya akan mendapat suatu pembalasan dari apa yang telah dilanggar. Sedangkan hukum pidana formil yaitu aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur cara penegakan terhadap hukum pidana materiil yang telah dilanggar.²⁴

²²Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2015),hal,4.

²³Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika,2005),hal,3.

²⁴ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014),hal,192.

2. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit yang berasal dari Bahasa Belanda dan kadang juga *delict* Bahasa Latin dari *Delictum* atau di Indonesia biasa disebut dengan tindak pidana. Tidak ada penjelasan mengenai *strafbaar feit* di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau biasa disebut dengan *criminal act* dengan tujuan yang sama. Karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, jadi yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*,²⁵ Menurut teks bahasa Indonesia dari KUHPidana, *strafbaar feit* ditemukan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini dengan artian tindak pidana.²⁶

Di Indonesia delik sama sama pengertiannya dengan tindak pidana, dalam kamus hukum tentang delik tertulis “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Jadi jika kita melakukan tindak pidana atau pelanggaran delik maka kita akan dikenakan sanksi oleh aturan yang berlaku.²⁷

Strafbaar feit mempunyai tiga kata, yang pertama adalah *straf*, *baar*, dan *feit* arti dari kata *straf* yaitu pidana dan hukum, *baar* diartikan boleh dan dapat, sedangkan *feit* dapat diartikan sebagai peristiwa, tindak, perbuatan dan

²⁵Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris . *Merajut Hukum Di Indonesia*,hal,193

²⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 55

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2007),hal,92.

pelanggaran. jadi *strafbaar feit* mempunyai 3 suku kata yang diartikan dalam Bahasa Indonesia. Tindak pidana mempunyai dua suku kata , yaitu :

- a. Tindak; dan
- b. Pidana

Tindak mempunyai arti yaitu langkah atau perbuatan pidana, dalam Bahasa Inggris yaitu *criminal*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafrechtelijke*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan istilah *verbrecher*. Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli. Frans Maramis mendefinisikan tindak pidana sebagai “Perbuatan yang pelakunya harus dipidana”. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya pelaku; dan
- c. Harus dipidana.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana yaitu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Kemudian menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya saja yang meliputi suatu tindak pidana. Adapun sifat orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut termaksud bagian dari masalah lain yaitu pertanggungjawaban pidana.²⁸

Menurut Hazewkel Suringa pengertian tindak pidana atau “*strafbaar feit*” Secara umum ialah “sebagai suatu tingkah laku manusia yang pada suatu waktu tertentu telah ditolak didalam satu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai

²⁸Rahman Syamsuddin, dan Ismail Aris . *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014),hal,194.

suatu tingkah laku yang harus dihapuskan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang mempunyai sifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Pompe sendiri mengartikan tindak pidana adalah suatu tindak pelanggaran norma yang dengan sengaja atau secara sadar ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan dan terjaminnya kepentingan umum

Menurut Simons sendiri merumuskan tindak pidana sebagai berikut, suatu tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dapat di hukum. Menurut simons apa sebab tindak pidana itu dirumuskan seperti diatas adalah karena.

- a. Untuk adanya suatu tindak pidana itu di isyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah di nyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-Undang.
- c. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *orechtmatige handling*.

Sedangkan menurut Teguh Prasetyo mengartikan tindak pidana yaitu “perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)”. Ada tiga unsur yang tercantum dalam pengertian yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, yang meliputi :

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya aturan hukum; dan
- c. Sifat perbuatannya.

Sifat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Aktif; dan
- b. Pasif

Bersifat aktif disini dimaksud bahwa pelaku sering melakukan atau melanggar tindak pidana yang telah diatur oleh hukum. Sedangkan bersifat pasif dalam hal ini bahwa pelaku tidak melanggar atau tidak berbuat yang sebenarnya yang diatur atau diharuskan oleh hukum. Jadi dari apa yang telah dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa Tindak Pidana merupakan :

“seseorang melakukan perbuatan jahat yang merugikan masyarakat banyak dan juga perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang tercantum

baik didalam KUHP maupun yang ada diluar KUHP. Ada tiga unsur yang termaksud dalam definisi delik pidana diatas yaitu :²⁹

- a. Adanya perbuatan jahat;
- b. Adanya subyek pidana; dan
- c. Sifat perbuatannya

Kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi untuk terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum³⁰. Pada hakikatnya semua perbuatan tindak pidana pasti mempunyai unsur. Demikian juga setiap tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana pada umumnya. Unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana menurut doktrin yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Dengan adanya unsur-unsur tersebut dapat kita definisikan sebagai berikut :³¹

- a. Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu berasal dari dalam diri pelaku. Unsur subjektif ini berlandaskan asas hukum pidana yang menyatakan *An act does not a personality unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah

²⁹Hj.Rodliyah dan H. Salim, "Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya", (Depok : Rajawali Pers, 2017), hal. 11.

³⁰Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra. Aditya Bakri, 2003). h. 41

³¹Hj.Rodliyah dan H. Salim, "Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya", (Depok : Rajawali Pers, 2017), hal.12.

perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Para ahli merangkum dan menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dalam tiga bagian yakni : 1). Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2). Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*). 3). Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*). Sedangkan yang dimaksud kealpaan terdiri atas dua, yaitu 1). Tak berhati-hati, 2). Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur objektif

Unsur objektif yaitu berasal dari luar diri pelaku yang terbagi menjadi empat, yaitu :

- 1) Perbuatan manusia itu sendiri yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif (*act*), dan perbuatan pasif atau perbuatan negative, yang artinya perbuatan yang mendimkan atau membiarkan (*omission*)
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia yang memberikan bahaya atau merusak bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, kehormatan, kemerdekaan dan lain-lain.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*), keadaan-keadaan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu (1). Keadaan pada saat perbuatan dilakukan,(2). Keadaan setelah perbuatan itu dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan difat melawan hukum. Disini yang dimaksud sifat dapat dihukum yaitu termaksud dalam alasan-alasan yang membebaskan orang tidak dapat dikuhum atau dibebaskan dari hukuman, sedangkan sifat melawan hukum yaitu

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini larangan atau perintah berbuat sesuatu.

3. Penggolongan Tindak Pidana

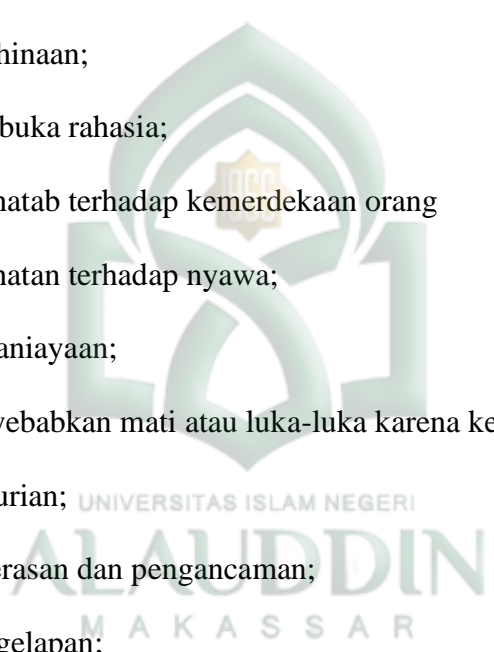
Pada saat ini penggolongan tindak pidana masi sangat banyak, karena penggolongan tindak pidana masih diberlakukan pidana yang dikenal di KUHP ataupun diluar KUHP. Adapun pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua bagian yaitu :³²

- a. Kejahatan; dan
- b. Pelanggaran

Yang termaksud perbuatan pidana kejahatan, meliputi:

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara;
- 2) Kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) Kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya;
- 4) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan;
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum;
- 6) Perkelahian tanding;
- 7) Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;
- 8) Kejahatan terhadap penguasa umum;

³²Hj.Rodliyah dan H. Salim, "*Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*", (Depok : Rajawali Pers, 2017), hal.15.

- 
- 9) Sumpah palsu dan keterangan palsu;
 - 10) Pemalsuan mata uang dan uang kertas;
 - 11) Pemalsuan matrik dan merek;
 - 12) Pemalsuan surat;
 - 13) Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan;
 - 14) Kejahatan terhadap kesusilaan;
 - 15) Meninggalkan orang yang perlu ditolong;
 - 16) Penghinaan;
 - 17) Membuka rahasia;
 - 18) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang;
 - 19) Kejahatan terhadap nyawa;
 - 20) Penganiayaan;
 - 21) Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan;
 - 22) Pencurian;
 - 23) Pemerasan dan pengancaman;
 - 24) Penggelapan;
 - 25) Perbuatan curang;
 - 26) Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak;
 - 27) Menghancurkan atau merusakkan barang;
 - 28) Kejahatan jabatan;
 - 29) Kejahatan pelayaran;
 - 30) Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan; dan

31) Penadahan penerbitan dan percetakan

Yang termaksud perbuatan pidana kejahatan, meliputi :

- 1) Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
- 2) Pelanggaran ketertiban umum
- 3) Pelanggaran terhadap penguasa umum
- 4) Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan
- 5) Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
- 6) Pelanggaran kesusilaan
- 7) Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan
- 8) Pelanggaran jabatan; dan
- 9) Pelanggaran pelayaran.

Tindak pidana yang tersebar di luar KUHP dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Tindak pidana yang telah ditentukan secara tersendiri dalam undang-undang; dan
- 2) Tindak pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral.

Tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang secara khusus, meliputi:

- 1) Tindak pidana korupsi;
- 2) Tindak pidana pencucian uang; dan
- 3) Tindak pidana terorisme.

Jenis-jenis pidana yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak disebutkan dalam perundang-undang tersendiri, namun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang meliputi:³³

- 1) Tindak pidana perikana;
- 2) Tindak pidana pertambangan;
- 3) Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 4) Tindak pidana perdagangan orang; dan
- 5) Tindak pidana pencucian uang.

“Penggolongan tindak pidana juga diatur diluar KUHP yang dikenal sebagai tindak pidana khusus. Undang-undang tindak pidanakhusus *a quo* tidak semuanya menetapkan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran hanya di jumpai dalam Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 atau Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi.”³⁴ Kemudian kejahatan juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum serta larang yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu oleh siapa yang melanggarnya.³⁵ Dan juga Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana³⁶

4. Sanksi Pidana

³³Hj.Rodliyah dan H. Salim, “*Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*”, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hal.16.

³⁴ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-undang Pidana*, Jurnal, 2015, h. 9.

³⁵Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993). h. 46

³⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 13.

Sanksi pidana biasa juga disebut *criminal sancties* dalam Bahasa Inggris, sedangkan dalam Bahasa Belanda biasa disebut dengan *strafrechtelijke sancties* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Ada dua macam yang terkandung dalam sanksi pidana, yaitu:³⁷

- a. Sanksi, dan
- b. Pidana.

Adapun pengertian sanksi pidana menurut para ahli yaitu menurut N.E. Alga, dkk, mendefinisikannya dengan pengukuhan, persetujuan, dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum, dalam hukum pidana, hukuman (*starf*), dan yang terakhir alat pemeriksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang diadakan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, sanksi yaitu:

- a. Pengesahan atau peneguhan; atau
- b. Tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati undang-undang; atau
- c. Tindakan-tindakan sebagai hukuman kepada suatu negara.

Dalam penjelasan diatas dapat kita ambil pengertian bahwa sanksi pidana bukan hanya diartikan dalam hukum pidana, tetapi juga didefinisikan dalam hukum perdata dan hukum internasional. Dalam hukum pidana sanksi pidana yaitu hukuman, sedangkan sanksi menurut hukum perdata yaitu tindakan memaksa orang

³⁷Hj.Rodliyah dan Prof.Dr. H. Salim, "*Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*", (Depok : Rajawali Pers, 2017), hal.17.

untuk menaati kontak, lain juga dengan pengertian saksi menurut hukum internasional sanksi itu dilihat dari hukum yang dijatuhkan oleh negara.

Sanksi pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pidana pokok
- b. Pidana tambahan

Pidana pokok adalah keputusan yang di ambil dengan keputusan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok terbagi menjadi lima, yaitu :³⁸

- a. Pidana mati : merupakan pidana yang jatuhkan untuk terpidana yang mempunyai tujuan untuk mencabut nyawa oleh terhakum atau terpidana yang dilakukan oleh algojo.
- b. Pidana penjara : dapat dilihat dari Pasal 12 KUHP yaitu yang dimaksud pidana penjara adalah berkaitan dengan jangka waktu terhukum di dalam penjara
- c. Pidana kurungan : pidana ini lebih rendah dari pidana penjara, pidana kurungan adalah yaitu hilangnya kemerdekaan terhadap yang terhukum.
- d. Pidana denda : adalah pidana yang dijatuhkan untuk terhukum dengan membayarkan sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

³⁸Hj.Rodliyah dan H. Salim, *"Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya"*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hal, 21.

- e. Pidana tutupan : pidana ini cenderung untuk para politisi yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena adanya oleh maksud yang patut dihormati.³⁹

Dalam perkembangan sistem pemidanaan tidak dipungkiri lagi bahwa tujuan pemidanaan dimulia dari retributif, *deterrence*, rehabilitasi hingga restoratif tidak akan lepas dari strategi kebijakan dan pilihan sarana berupa sanksi yang telah dirumuskan dalam berbagai aturan perundang-undangan.⁴⁰

B. Kesalahan

Masyarakat Indonesia dianggap mengerti dan mengetahui keekstensian Undang-undang dan peraturan yang telah berlaku, jadi setiap orang yang mampu dan bisa memberi pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat dalam hal ini yang termaksud dalam konteks pidana. Jadi tidak ada alasan seseorang bahwa seseorang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan dan diancam sanksi pidana atas apa yang telah ia lakukan.

Kesalahan atau biasa disebut juga dengan *schuld* merupakan hal keadaan serta gambaran seseorang yang dilihat sebelum melakukan kesalahan maka dari itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Berbeda dengan unsur sifat melawan hukum, dalam hal ini sifat melawan hukum bisa berganti sifat yaitu sifat objektif dan subjektif, tergantung pada orang yang melihat tindak pidana tersebut.

³⁹ Hj.Rodliyahdan H. Salim, "*Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*", (Depok : Rajawali Pers, 2017), hal, 22.

⁴⁰ Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Per masyarakatan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017). h. 23.

Sedangkan dalam pengertian hukum pidana dibagi menjadi ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang umum yaitu :

1. Dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukannya;
2. Pembuat dan perbuatan yang berkaitan dengan psikis. Yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan dalam arti yang sempit atau biasa disebut dengan culpa
3. Tidak ada dasar peniadaan pidana sebagai penghapus dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Dari yang disebutkan di poin ketiga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kaitan antara kesalahan dan melawan hukum saling berkaitan. Karena tidak akan mungkin ada kesalahan tanpa diawali dengan perbuatan melawan hukum, tetapi menurut Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa melakukan kesalahan. Jadi kesimpulannya kesalahan tidak akan ada tanpa diawali dengan melawan hukum tetapi, ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.⁴¹

Tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh orang melakukan tindak pidana. Maka dari itu kesalahan merupakan titik permasalahan pertanggungjawaban pidana atau bisa juga dikatakan yaitu kesalahan adalah unsur yang akan selalu berlaku dan tidak mungkin akan dihapus. Maka dari itu, adagium yang sangat populer yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” seharusnya diubah menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa

⁴¹Andi Hamzah, S.H. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.130.

kesalahan”. Artinya tidak akan dimintai pertanggung jawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukan tanpa melakukan kesalahan.⁴²

Sedangkan para pakar hukum pidana menjelaskan kesalahan dengan banyak pendapat tetapi semua yang dikemukakan merujuk kepada kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Tetapi kesalahan normatif lebih dapat diterima daripada kesalahan psikologis, karena kesalahan normatif lebih kepada mencari tau apa yang sebenarnya terjadi dan merupakan hal-hal yang dapat ditemukan fakta-faktanya dibandingkan dengan kesalahan psikologis yang lebih mengedepankan pikiran yang belum tentu kebenarannya.⁴³

Dalam mendefinisikan kesalahan normatif yang telah disebutkan diatas, mempunyai tiga unsur pokok yang perlu dijelaskan yakni dapat dicela, dipandang dari segi masyarakat, dan dapat melakukan perbuatan lain. Yang pertama dapat dicela maksudnya disini mempunyai dua arti yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana. Sedangkan kesalahan psikologis yaitu yang menitikberatkan pada keadaan batin seseorang dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa. Sehingga pelaku dapat memertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilagarnya. Tidak dapat diikuti karena menimbulkan persoalan dalam menjalankan hukum yang dipicu oleh ketidakadaan unsur dengan saja atau karena kealpaan dalam rumusan tindak pidana.

⁴² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 23.

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal. 157.

Kedua dilihat dari segi masyarakat, menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Ketiga yaitu dapat berbuat lain, maksud dari kata tersebut adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti yang lain sebenarnya pembuat dapat melakukan yang lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana.⁴⁴

Kesalahan tersebut terbagi menjadi dua yaitu :

- 1.Sengaja (*dolus*)
- 2.Kelalaian (*culpa*)

Sengaja (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan yang dimana dalam hal ini perbuatan yang dilakukan dengan sadar atau mengerti dengan apa yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun teori-teori tentang sengaja yaitu teori kehendak, teori membayangkan.

Contoh “Sengaja” :

B menghendaki kematian si C. maka B merencanakan agar membunuh C pada hari senin pukul 18:00, B kemudian memberi racun pada makanan C dan tidak lama kemudian C keracunan dan akhirnya meninggal dunia. Seperti inilah contoh sederhana “sengaja” yang paling muda dipahami.

Ada beberapa istilah kuno “sengaja” yang jarang muncul dalam literature dan praktek .bahkan Undang-Undang tidak mengambil istilah ini, tetapi sangat

⁴⁴Mahrus Ali,..*Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2015),hal,160.

penting untuk diketahui yaitu: a). *Dolus directus*, b). *Dolus indirectus*, c). *Dolus determinatus/Dolus indeterminatus/Dolus alternativus*, d). *Dolus generalis*, e). *Dolus premeditates/Dolus repentinus*, f). *Dolus antecedens/Dolus subsequens*, g). *Dolus malus*.⁴⁵

Sedangkan kelalaian (*culpa*) merupakan perbuatan yang tidak dikendaki oleh pelaku tindak pidana. Tetapi, perbuatan yang dia lakukan merupakan kesalahan dari pelaku karena sebelum dia melakukan perbuatannya tersebut pelaku tidak memikirkan akibat-akibat yang timbul dari apa yang dia perbuat, karena apa yang pelaku perbuat tersebut mengakibatkan adanya kerugian bagi orang lain.

C. Teori culpa

Tidak ada penjelasan mengenai apa itu Kealpaan (*culpa*) dalam KUHP. Tetapi, culpa juga diancam dengan hukuman pidana walaupun hukumannya lebih ringan daripada sengaja (*dolus*) karena sengaja dianggap menghendaki terjadinya suatu perbuatan pidana sedangkan kealpaan (*culpa*) dalam hal ini tidak menghendaki atas akibat dari perbuatannya. Tetapi, pelaku kurang berhati-hati atau tidak mengindahkan dari apa yang sudah dilarang.

Undang-Undang sendiri tidak memberikan pengertian mengenai apa itu kealpaan(*culpa*). Tetapi pengertian itu diberikan agar didefinisikan oleh ilmu hukum pidana, dan beberapa ahli pidana sudah banyak yang menjelaskan dan memberikan syarat-syarat apa saja sehingga dapat dikatakan kealpaan

⁴⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.124.

(*culpa*) diantaranya yaitu Simons yang memberikan dua syarat terhadap kealpaan (*culpa*) yaitu:⁴⁶

1. Tidak adanya kehati-hatian;
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin ;
3. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan;
4. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.

Adapun pengertian dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*) dari pendefinisian hukum pidana yang diketahui sifat-sifatnya yaitu ciri-ciri dari *culpa*, yaitu. :

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan menggunakan ingatannya secara salah seharusnya dia menggunakan pikirannya dengan baik agar tidak melakukan kesalahan tetapi pelaku kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan dari apa yang dilarang. sehingga melakukan perbuatan tersebut.
2. Sebenarnya pelaku bisa memperkirakan akibat yang akan timbul tetapi pelaku lebih memilih melanjutkan perbuatannya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi setelahnya. Karena perbuatan yang dilakukannya tersebut pelaku kemudian dicela karena berbuat hal yang melawan hukum.⁴⁷

⁴⁶ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal, 107.

⁴⁷ P.A.F., Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Cetakan keempat (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2011), hal, 342.

Menurut E.Y. Kanter mengartikan *culpa* yaitu “Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.”⁴⁸

Moeljatno mengatakan bahwa “kealpaan adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian yang diberikan kepada Moeljatno dapat kita ambil kesimpulan bahwa kealpaan (*culpa*) memiliki arti yang lebih rendah dari konteks kesalahan, ini sangat berbeda dengan kesengajaan dalam kesalahan karena dalam kesalahan dapat dilihat positif yang ada bahwa perbuatan yang dilarang tersebut betul-betul adalah kehendak pelaku berbeda dengan kealpaan (*culpa*) yang sama sekali tidak ditemukan positifnya”. Jadi, Moderner membagi dua bentuk kealpaan (*culpa*) yaitu kealpaan yang didasari dan kealpaan yang tidak disadari, kealpaan yang disadari maksudnya adalah kealpaan yang paling ringan. Karena, dalam tindakannya tidak diinsyafi atau memang tidak ada niat kesengajaan tetapi perbuatan tersebut dilakukan tanpa berfikir-fikir lagi berbeda dengan kealpaan yang disengaja maksudnya dia sudah mengetahui apa dampaknya tetapi memikirkan hal yang bisa

⁴⁸ E.Y.Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Tiara Ltd, hal.92).

dia lakukan atau kepintaran yang seharusnya pelaku tidak lakukan yang membuat tindakan tersebut akhirnya berdampak kepada dirinya sendiri.⁴⁹

Culpose delicate adalah unsur dari kealpaan (*culpa*) yang tidak berhati-hati yang hukumannya lebih rendah dari *culpose delicten*, yaitu tindak pidana yang turun dari kesengajaan. Pasal 188 KUHP menerangkan tentang *culpose delict* yaitu yang menyebabkan kebakaran, peledakan, atau banjir dengan kurang berhati-hati. Ini dapat diartikan kesengajaan dapat pula juga dikatakan dengan kealpaan (*culpa*).⁵⁰

Banyak istilah yang terdapat untuk merujuk pada kata kealpaan, yaitu teledor, sembrono, *negligence*, dan *recklessness*. Kemudian pengertian kealpaan menurut Van Hamel, beliau mendefinisikan kealpaan bahwa kealpaan mengandung dua unsur, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; dan
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁵¹

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa dapat dikatakan *culpa* jika dalam batin pelaku perbuatan tindak pidana bersifat lalai, ceroboh, teledor, atau kurang berhati-hati sehingga apa yang diperbuat

⁴⁹Mahrus Ali, S.H, M.H..*Dasar-Dasar Hukum Pidana* , (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2015),hal.178.

⁵⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002),hal.70.

⁵¹ Hanafi Amriani Dan Mahrus Ali, , (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal.42.

pendapatkan akibat yang melanggar hukum.jadi sebenarnya kealpaan ini sama sekali tidak ada unsur sengaja ataupun niat untuk melakukan tindak pidana yang melanggar hukum tersebut. Tetapi, pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak berhati-hati dalam bertindak, sehingga harus tetapi dipersalahkan atas apa yang diperbuatnya. Hal inilah yang menjadikan seseorang harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu.

Adapun dasar hukum mengenai kealpaan ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360 tentang masalah-masalah kealpaan yaitu :

1. Pasal 359 KUHP :

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

2. Pasal 360 KUHP :

(1). Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.

(2). Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatanatau pencarian selama waktu

tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.⁵²

Sedangkan Undang –Undang tentang kelalaian mengakibatkan kebakaran adalah Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”⁵³

D. Korsleting Listrik

Korsleting listrik atau biasa disebut juga dengan hubungan pendek (dari Bahasa belanda yaitu *kortsluiting*) merupakan suatu ikatan dengan tahanan listrik yang rendah. Mengakibatkan aliran listrik yang sangat tinggi dan jika tidak ditangani dengan cepat akan mengakibatkan ledakan atau kebakaran, karena kawat listrik dari kutub positif dan kawat listrik dari kutub negatif bersentuhan. Maksudnya arus listrik sangat besar sehingga dapat menyebabkan penghantar seperti kabel, striker, air yang masuk berubah dengan suhu yang sangat tinggi dan akhirnya mendidih dan meleleh.

⁵²Undang-Undang No.1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia Pasal 359 dan 360.

⁵³Undang-Undang No.1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia Pasal 188.

Akibat korsleting listrik ini sehingga dapat terjadi kebakaran. Kebakaran bukan hanya tentang korsleting listrik. Tetapi , berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang paling besar mengakibatkan kebakaran adalah korsleting listrik .

Hartadi mengemukakan bahwa banyak seakale penyebab hingga terjadinya kebakaran yaitu :

1. Penggunaan kabel yang terlalu kecil disbanding beban listrik yang dialirkan.
2. Sambungan tidak sempurna memicu panas berlebihan.
3. Banyaknya instalasi yang dikerjakan dengan material yang digunakan tidak sesuai SNI dan tidak sesuai dengan PUIL 2000.
4. Tusuk kontak yang longgar
5. Menumpukkan tusuk kontak listrik yang terlalu banyak pada suatu perangkat stop kontak sehingga menimbulkan panas yang berlebihan.
6. Penggantian kawat lebur pada sekering dengan kawat yang lebih besar akan sangat berbahaya karena melebihi kapasitas pada sekering tersebut, sehingga apabila terjadi hubungan singkat sekering / kawat lebur tidak putus, dapat mengakibatkan bahaya kebakaran.
7. Kabel yang terkelupas / tidak terisolasi dengan baik.
8. Tusuk kontak yang tidak masuk dengan sempurna pada stop kontak.
9. Penggunaan peralatan yang tersambung dengan listrik tanpa pengawasan.

10. Tidak dilakukan pengecekan / perawatan terhadap instalasi.⁵⁴

Jadi jika instalasi rumah atau gedung tidak standar , dapat berbagi macam kerusakan yaitu kebakaran yang akan timbul akibat kelalaian dan pemakaian listrik yang salah , sehingga banyaknya kerugian seperti kerugian material yang cukup besar, selain itu juga dapat mengakibatkan kehilangan nyawa. Selain itu juga kita harus mentaati peraturan-peraturan sesuai dengan ketentuan PUIL 2000 serta cocok dengan instruksi pabrik yang membuat peralatan tersebut.⁵⁵

Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan diatas adalah serta pengalaman tentang korsleting listrik yaitu.

1. Yang sangat memicu terjadinya korsleting listrik adalah kesalahan manusia itu sendiri. Karena dalam penerapannya listrik dipasang dengan sebaik-baiknya.
2. Adapun penyebab lain yaitu terjadinya api listrik karena terjadinya loncatan listrik (*loss-contact*) atau adanya arus harmonik baik sistem supali ataupun sistem beban.

E. Metode Pengendalian Kebakaran

Menurut Penulis metode pengendalian kebakaran dapat kita artikan sebagai cara-cara penangulangannya bahaya kebakaran yaitu yang berarti mencegah

⁵⁴ Muhammad Mansyur Jayadi, “Perancangan Media Edukasi Augmented Reality Sebagai Petunjuk Instalasi Listrik Dan Penggunaan Listrik Pada Perangkat Elektronik Rumah Tangga”, (Makassar : Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya,2017),hal.10.

⁵⁵ Indra Z dan Ikhsan Kamil, “Analisis Sistem Instalasi Listrik Rumah Tinggal Dan Gedung Untuk Mencegah Bahaya Kebakaran “, (Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta, Vol.2 No.1,(Maret 2011),hal.5.

meluasnya bahaya kebakaran dengan mengendalikan api yang timbul tanpa dikehendaki dan yang dapat mengarah pada terjadinya kebakaran.

Ada 3 (tiga) pokok penyebab terjadinya kebakaran yang dikategorikan sebagai berikut

1. Kelalaian manusia
 - a. Merokok tidak pada tempatnya.
 - b. Kecerobohan penggunaan alat listrik .
 - c. Membuang bensin sambil merokok/menyalakan api.
 - d. Membuang puntung rokok berapi dalam tempat sampah kering.
 - e. Membiarkan saluran Elpiji (LPG) bocor.
2. Kerusakan alat, motor listrik yang terbakar (hubungan singkat).
3. Unsur Kesengajaan; *SABOTAGE*.

Selain itu 3 (tiga) unsur pokok pencegahan kebakaran dapat dikelompokkan seperti:

- a. Usaha / aktifitas pencegahan.
 - b. Kesiapan peralatan / perlengkapan penanggulangan
 - c. Kesiapan penyelamatan jiwa dan harta benda.
4. Penjalaran Kebakaran

- a. Konveksi

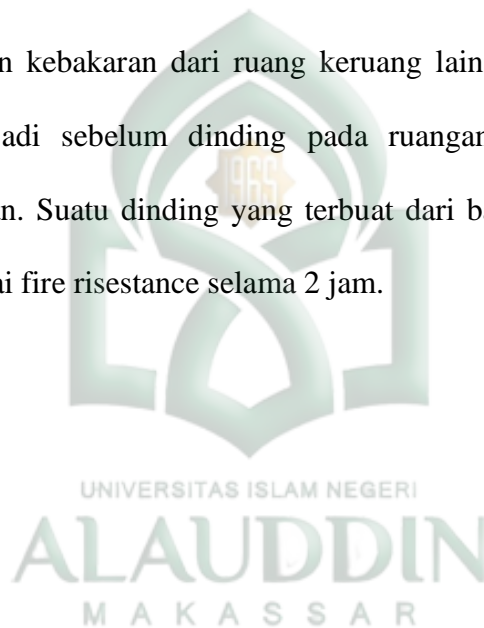
Kecepatan rambatan api vertical dapat diperkirakan kuantitasnya. Pada umumnya, api vertical akan meningkat menjadi dua kali total tingginya pada penambahan waktu yang sama, dikenal sebagai pertumbuhan eksponensial.

b. Penjalarana api pada permukaan horizontal

Api menyebar dipermukaan horizontal. Permukaan bahan padat yang berada pada bagian belakang lintasan nyala api akan terbakar akibat panas balik dari zona pembakaran. Uap bahan bakar yang terbakar akan bergerak kedepan, akibat bertambah tingi tempraturnya ketika mendekati nyala api.

c. Penjalaran kebakaran dari ruang keruang pada suatu bangunan

Penjalaran kebakaran dari ruang keruang lain pada suatu bangunan dapat terjadi sebelum dinding pada ruangan tersebut mengalami kehancuran. Suatu dinding yang terbuat dari batu bata setebal 4 inci mempunyai fire risestance selama 2 jam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah penelitian lapangan, yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian penulis dengan maksud untuk mengetahui bagaimana penerapan teori culpa tersebut dilakukan oleh subjek penelitian dan menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari orang-orang yang dianggap lebih tahu, dan akan mendeskripsikan mengenai bagaimana pertimbangan kepolisian dalam proses penanganan perkara kasus kebakaran korsleting instalasi listrik.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini bertempat di kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian juga akan bertempat di Lembaga Hukum yaitu kepolisian di Kecamatan Lumbis karena akan ada pertimbangan kepolisian yang diminta dalam perkara ini. Adapun alasan penulis mengambil lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian karena penulis berpendapat bahwa masalah ini sangat krusial untuk diteliti lebih dalam, masih adanya masyarakat yang masih awam perihal perkara tersebut, oleh karenanya penulis mengambil lokasi penelitian di daerah ini.

C. Sumber Data

Adapun data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari :⁵⁶

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian berupa wawancara dalam hal ini pihak yang terkait yaitu kepolisian, Pak Agus Salim, saksi yang melihat secara langsung kejadian, dan masyarakat yang mendapat kerugian dalam perkara ini
2. Data sekunder yaitu data yang sebelumnya sudah ada atau didapat secara tidak langsung oleh penulis berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, tulisan ilmiah, skripsi, makalah, dan sumber yang lainnya dalam bentuk tertulis dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah:

1. Wawancara

Adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah kepolisian, Bapak Agus Salim, saksi yang melihat secara langsung kejadian, dan masyarakat yang mendapatkan kerugian dalam perkara ini. Metode wawancara ini bertujuan agar memperoleh informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet.IX; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.31.

Penulis melakukan pengambilan data kepada Lurah, Staf Kecamatan, Dinas Kebakaran Kabupaten Nunukan(Disdamkar), salah satu Masyarakat yang tertimpa Kebakaran, Pak Agus (orang yang melakukan kelalaian) dan Pihak Kepolisian di Kecamatan Lumbis, tentang bagaimana Penerapan Teori *Culpa* di Kasus Kebakaran di Kecamatan Lumbis. Dengan hal-hal yang berkaitan tentang Kebakaran yang terjadi di Kecamatan Lumbis.

2. Observasi

Observasi yaitu cara mengamati dan melakukan pencatatan agar mendapatkan sebanyak mungkin data atau informasi dari sumber data serta informan secara langsung. Penelitian ini kemudian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara terhadap 6 (enam) orang informan yang masing-masing berstatus sebagai Lurah, staf kecamatan, Disdamkar, Masyarakat, Pelaku, dan Pihak Kepolisian. Hasil penelitian disusun dalam bentuk deskriptif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen (keputusan atau peraturan), karya-karya atau gambar yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian yang dimaksud oleh penulis yaitu alat bantu dalam melakukan penelitian. Adapun alat bantu yang akan penulis gunakan yaitu :

1. Pedoman wawancara

Adapun pedoman wawancara yang digunakan untuk memudahkan penulis berdialog dan mendapatkan data tentang bagaimana proses penyelesaian perkara kasus kebakaran korsleting instalasi listrik di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan adalah berupa daftar pertanyaan.

2. Buku catatan alat tulis beserta daftar pertanyaan

Buku catatan alat tulis beserta daftar pertanyaan digunakan untuk mencatat, memberikat pertanyaan dan mencatat semua informasi yang terkait dengan penelitian yang didapatkan dari sumber data.

3. Alat perekam

Alat perekam ini digunakan untuk merekam semua percakapan atau jawaban pembicaraan dengan informan dan agar dapat mendokumentasikan gambar yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan data yaitu proses menganalisis data yang telah didapatkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan . adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini ialah:

1. Klarifikasi data yaitu mengelompokkan atau mengaketagorikan data yang telah dihasilkan dalam proses penelitian;
2. Reduksi data yaitu mengurangi atau memilah data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti;
3. Editing yaitu pemeriksaan data dari hasil penelitian agar mengetahui hubungan dan keabsahan data serta menghilangkan keraguan terhadap data yang didapat dari sumber lain;

4. Analisis data yaitu proses menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis memakai metode analisa data secara kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan, memilah, mengelompokkan, dan mencatat hasil dari observasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan

Kecamatan Lumbis merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Nunukan. Kecamatan Lumbis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis ongong luas wilayah Kecamatan Lumbis mencapai 3.645,50 Km² tak heran jika kecamatan Lumbis di nobatkan menjadi Kecamatan terluas di Kabupaten Nunukan. Terletak di daratan Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan kabupaten malinau di sebelah selatan, di sebelah barat dengan Kecamatan Krayan, di sebelah Timur sengan Kecamatan sebuku dan sembakung dan juga disebelah Utara dengan Sabah-Malaysia. luas wilayah Kecamatan Lumbis mencapai 3.645,50 Km² tak heran jika kecamatan Lumbis di nobatkan menjadi Kecamatan terluas di Kabupaten Nunukan. Terletak di daratan Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan kabupaten malinau di sebelah selatan, di sebelah barat dengan Kecamatan Krayan, di sebelah Timur sengan Kecamatan sebuku dan sembakung dan juga disebelah Utara dengan Sabah-Malaysia. Mata pencaharian Masyarakat Kecamatan Lumbis adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Mengenai makanan masyarakat wilayah ini sangat susah dijangkau oleh masyarakat luas karena jalur transportasinya yang hanya bisa dijangkau oleh kendaraan bermotor, selain itu masyarakat lumbis juga sangat mempertahankan tradisi/adatnya.



Gambar 1 : Peta

Kecamatan Lumbis



Gambar 2 : Distribusi Penduduk Kecamatan Lumbis dan kecamatan Lumbis Ongong

2. Data Kebakaran Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan

a. Data kebakaran yang terjadi di Kecamatan Lumbis dalam kerugian kecil

Sepanjang 2019-2020, Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kabupaten Nunukan mencatat 9 rumah warga yang Ludes karena Korsleting Listrik dan Tabung gas yang meledak dalam kerugian kecil.

- 1) Terjadi kebakaran rumah di jl. Tawakkal, dimana 1 (satu) rumah ludes terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran yang cepat tanggap bisa menguasai api dalam waktu singkat sehingga rumah lainnya bisa terselamatkan. Jumat, 06/09/2019 Pukul 14.40 Siang (Disdamkar Nunukan)
- 2) Terjadi kebakaran di jl. Kantor Camat lebih tepatnya di rumah (Bapak Joni Tiama Sabon, diduga akibat Korsleting Listrik. Selasa, 01/10/2019 (Disdamkar Nunukan)
- 3) Terjadi kebakaran di Desa Mangsalong lebih tepatnya di jl. Anang Siad Rt.01. kejadian yang terjadi ini berasal dari tabung gas yang meledak. Senin, 09/12/2019 Pukul 06:00 Pagi (Disdamkar Nunukan).

- 4) Terjadi kebakaran di Jl. Sei Fatimah Rt.03 berdasarkan informasi yang didapat oleh warga penyebab kebakaran adalah Korsleting Listrik. Selasa, 10/12/2019 Pukul 17:00 Sore (Disdamkar Nunukan)
- 5) Terjadi kebakaran di Jl. Tawakal dari info yang didapat kebakaran tersebut diakibatkan korseleting listrik. Minggu 15/12/2019, Pukul 12:15 Siang (Disdamkar Nunukan)
- 6) Terjadi kebakaran di Jl. Pembangunan Rt.09 kebakaran terjadi menurut masyarakat setempat berasal dari tabung gas. Rabu, 12/02/2020 Pukul 10:10 WITA (Disdamkar Nunukan)
- 7) Terjadi kebakaran di Jl. Hasanuddin Rt.05 sebelah RTP aji kuning penyebab dari kebakaran menurut masyarakat setempat berasal dari tabung gas yang meledak. Rabu, 09/03/2020 Pukul 12:00 WITA (Disdamkar Nunukan)
- 8) Terjadi kebakaran akibat Korsleting Listrik di Jl. Bhayangkara. Rabu, 10/06/2020 Pukul 22:00 (Disdamkar Nunukan)
- 9) Terjadi kebakaran di jl.merpati diduga akibat korsleting listrik, Jumat, 12/06/2020 pukul 12:35 (Disnamkar Nunukan)

b. Data kebakaran yang terjadi di Kecamatan Lumbis dalam kerugian besar.

No	Desa	Tgl/bln/thn	Jumlah rumah yang terbakar	Jumlah kerugian
----	------	-------------	----------------------------	-----------------

1.	Sangkup	07/09/2012	8 rumah 2 sepeda motor, 4 tokoh kelontong	3 milyar
2.	Tanjung Hulu	21/04/2014	Pasar Yamaker	6 milyar
3.	Deralon	14/08/2014	2 rumah, 1 motor	1,5 milyar
5.	Kalampising	27/02/2016	Karhutla (1,8 Hektar)	-
6.	Dubulon	04/05/2017	Karhutla	-
7.	Patal II	07/02/2018	Karhutla	-
8.	Podong	09/04/2018	Karhutla	-
9.	Nainsid	17/09/2018	Karhutla	-
10.	Pa Lemumut	02/03/2019	Karhutla	-
11.	Saludan	12/04/2019	Karhutla	-
12.	Sasibu	08/06/2019	Karhutla	-
13.	Deralon	28/06/2019	Karhutla	-
14.	Libang	22/07/2016	Karhutla	-
15.	Sangkuyun	02/09/2019	Karhutla	-
16.	Likos	31/09/2019	Karhutla	-

17.	Semalat	26/11/2019	Karhutla	-
18.	Tubus	03/12/2019	Karhutla	-
19.	Sumalung	03/01/2020	Karhutla	-
20.	Mansalong	27/03/2020	Karhutla	-
21.	Onong	22/04/2020	Karhutla	-
22.	Mansalong	26/11/2018	22 ruamah Warga, 1 peningapan,, toko sembako dan alat tulis, sepeda motor dan kendaraan roda 4	7 milyar

B. Penerapan Teori Culpa Dalam Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kec. Lumbis Kab. Nunukan

Culpa atau Kealpaan atau Kelalaian atau Ketidaksengajaan merupakan kesalahan yang masih sangat tabu di kalangan masyarakat. Tidak disadarinya kesalahan dalam *Culpa* (kelalaian) karena kesalahan ini mempunyai titik yang sangat buram untuk dilihat kesalahannya, kelalaian seseorang yang dianggap tidak sengaja ternyata mempunyai dampak besar bagi masyarakat ini merupakan delik

atau tindak pidana berbeda dengan delik *Dolus* yang merupakan delik yang disengaja di dalam KUHP berada pada Pasal 354 yaitu dengan sengaja melukai orang lain, atau pasal 231 yaitu dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita atau pasal 323 ayat 1 dengan sengaja merusak segel dalam penyitaan atau pasal 187 yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran.

Berbeda dengan delik *Dolus* Delik *Culpa* merupakan delik kelalaiian yang tanpa sengaja melakukan tindak pidana tersebut seperti yang berada pada pasal 231 ayat 4 yaitu Kealpaanya dikeluarkan barang-barang dari sitaan, atau pasal 360 karena kealpaanya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, atau pasal 189 karena kealpaannya menyebabkan kebakaran.

Disini penulis melakukan penelitian tentang delik *Culpa* atau kelalaian mengenai kebakaran yang berada pada pasal 188 yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahan (Kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. dan untuk dipidana pada pasal ini harus memenuhi 2 unsur : (1). Karena perbuatannya menimbulkan kebakaran, banjir atau ledakan jadi kesalahan tersebut bukan karena kesengajaan, tapi akibat kelalaian; (2). Karena kesalahannya, muncullah bahaya keseluruhan bagi nyawa, bagi barang irang lain yang ada ditempat atau mengakibatkan orang meninggal. Ini menjelaskan bahwa bagaimanapun kebakaran terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja tapi karena

kelalaiannya menyebabkan kebakaran tetap akan dituntut pidana dengan pasal 188.

Tetapi karena tidak pahamnya suatu wilayah masyarakat membuat delik *Culpa* dipandang dengan kesalahan yang tidak perlu untuk dituntut dengan pasal 188. Menurut Pak Jamiat warga masyarakat desa Mangsalong Kecamatan Lumbis yang juga bekerja sebagai staf di kantor camat Lumbis menurutnya Pak Agus memang melakukan kesalahan karena menurut Pak Jamiat bahwa Pak Agus sudah diperingatkan beberapa kali oleh warga sekitar tentang Instalasi Listrik dirumahnya yang sudah sering kali mengalami korslet untuk dipanggilkan PLN tetapi Pak Agus tidak mengindahkan perkataan masyarakat setempat.⁵⁷

Begitupun dengan pernyataan ibu Manik bahwa pak agus sudah seringkali diperingatkan karena disekitar rumah pak agus terdapat banyak tokoh-tokoh penjual bahan pokok, pakaian, dan alat rumah tangga lainnya apalagi pak agus juga merupakan penjual tabung gas tetap diteras rumahnya. Dengan begitu pada saat terjadi kebakaran sekitar pukul 01 : 30 Wita Senin (26/11) ini merupakan kebakaran terbesar di wilayah kabupaten Nunukan.

Menurut Pak Idrus salah satu korban kebakaran didesa mangsalong mengatakan bahwa rumah miliknya ludes dilalap api Pak Idrus bahkan tidak sempat menyelamatkan harta bendanya, ia baru tahu pada saat salah satu keluarganya yang lebih dulu terbangun karena suaea ledakan yang berasal dari kebakaran, awalnya “Dia” kemenakan Idrus terbangun karena suara ledakan dan dia keluar rumah dan baru menyadari bahwa terjadi kebakaran disamping rumah saat itulag dia

⁵⁷ Pak Jamiat, Desa Mansalong, Wawancara, Mangsalong, 12 Maret 2020.

membangunkan saya, ujar Pak Idrus. Pak Idrus didalam kamar beserta istri dan anaknyaapun keluar rumah pak idrus hanya mengambil dokumen penting dan cepat menyelamatkan keluarganya. Saat kembali kerumah rumah pak idrus susah tidak memungkinkan untuk menyelamatkan harta bendanya. Kata Pak Idrus juga jika tidak ada pemadam kebakaran dari kecamatan lain besar kemungkinan Kecamatan Lumbis akan tersapu habis, api sangat jelas dari arah Malinau katanya.⁵⁸

Dengan kejadian ini Pak Agus akhirnya dibawa oleh aparat kepolisian untuk diminta keterangannya dan bebas dengan cara mediasi dang anti rugi dengan 20 juta satu kartu keluarga. Disinilah pengetahuan masyarakat lumbis desa mangsalong sangat awam mengenai delik Culpa atau kelalaian yang merupakan suatu tindak pidana yang jelas berada di Pasal 188.

Menurut analis penulis Indonesia adalah negara hukum, yang dimana segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat maupun individu, itu semua diatur oleh hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indone sia adalah Negara Hukum”. Maka dari itu untuk menjalankan suatu Negara dan untuk melindungi Hak asasi Manusia harus berdasarkan hukum, karena segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia sudah ada hukum yang mengaturnya sehingga perilaku masyarakat dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Maka dari itu kasus penulis belum puas akan sanksi yang dijatuhkan.

⁵⁸ Pak Idrus, Desa Mangsalong, Wawancara, Mangsalong, 12 Maret 2020.

**DAFTAR NAMA YANG TERKENA MUSIBAH KEBAKARAN YANG
BELUM MENYERAHKAN BERKAS BERDASARKAN KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR : 188.45/564/IX/2019**

NO	NAMA	ALAMAT	BESAR BANTUAN
1	FILIM	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
2	MILON	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
3	AGUS SALIM	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
4	YAJUNG	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
5	RAMLI	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
6	WIWIN	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
7	EMANG	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
8	ASENG DERMAWAN	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
9	ASIONG/ARIANTO	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
10	KORNALIUS	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
11	SUWANTO	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
12	TINUD	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
13	SUMBANGAN	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
14	BIAWAN	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-

15	MALIBOS	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
16	SANDAYUN	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
17	SORONG	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
18	LALUNG	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
19	RISTON	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
20	LUJI	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
21	BILANGAN	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
22	RAIKON	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
23	JAMAN	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
24	SAIFUL	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
25	ARHAM	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
26	SADIK	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
27	FADLI	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
28	SALAMPE	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
29	INDAH	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
30	RUMBYAH	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
31	LALATANG	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-

**DAFTAR NAMA YANG SUDAH SELESAI BERKASNYA SESUAI
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.45/564/IX/2019**

NO	NAMA	ALAMAT	BESAR BANTUAN
1	AGUS SALIM	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
2	MERSI/JUMAN/FERDINAN	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
3	ASIONG ARIANTO	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
4	ASENG DARMAWAN	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
5	RUTINA	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
6	FILIM	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
7	NAMHUI	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
8	RISTON	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
9	ARIFIN/HALIAH	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
10	RAFI M.SARIF/SABRINA/SELAMET	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
11	UNGKUM/KUSUMA	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
12	ASRAH	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
13	AMIR	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
14	BUATAN	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-

15	PUSPA	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
16	JUMANI	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
17	M. DAUD	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
18	PAMIMPIN	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
19	ROBBY	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
20	SUGINTO	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
21	MAIMUNAH/AMRULAH	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
22	LISON	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
23	KUDUS	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
24	NAMBILANGAN	KEC. LUMBIS	Rp. 1.000.000,-
25	ASTRON	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
26	MAYLA	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
27	MINDUM	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
28	WASTERN CULOS	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
29	SANTI ANDONG	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
30	TAEMMA	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
31	ROTERUS	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
32	SAMPANG	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-

33	INDAH SEKAR AYU	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
34	IDANG MALAWANG	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
35	PATE	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
36	NYOMANG SITORUS	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
37	PAKKANUN	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
38	YULIANTI	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
39	IMRAN HARAPAN	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
40	WIRDA	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
41	FADIL ASFANI	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
42	WIKO ORUS	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
43	KARYANG	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
44	DEKKUELO	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
45	MINANG	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
46	ONGGENG	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
47	SABA	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
48	TRYANA	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-
49	ELAN	KEC. LUMBIS	Rp. 5.000.000,-

Analisis penulis bahwa di Kecamatan Lumbis tidak menerapkan teori *culpa* atau bisa di sebut masyarakat di Kecamatan Lumbis masih sangat awam mengenai hal ini. Masyarakat belum mengetahui apa itu tindak pidana kelalaian, apakah kelalaian merupakan bentuk kesengajaan yang dapat di jerat hukum.

C. Pertimbangan Kepolisian Dalam Memproses perkara kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kec.Lumbis Kab.Nunukan

Sesuai dengan laporan Kepolisian setempat melalui Kasubag Humas Polres Nunukan. Iptu Karyadi di Nunukan pada hari senin mengatakan kejadiannya bermula pada hari senin pukul tanggal 25 bulan 11 sekitar pukul 17.00 wita dana pi baru bisa dipadamkan pada hari senin sekitar pukul 05 :00 Wita. Pantauan aparat Kepolisian di tempat kejadian dan informasi langsung dari saksi mata , asap tebal keluar dari sebuah tokoh kebutuhan pokok yang berada di jalan Maramis RT 01 Desa Mansalong.

Dengan kejadian ini banyak rumah di Desa Mansalong ludes dilalap api. Pak Karyadi juga mengatakan kebakaran ini juga memakan bangunan penginapan, 3 unit motor, dan 2 unit mobil kebakaran baru bisa dipadamkan jam 5 kemudian. Total bangunan yang terbakar ada 22 unit warga, 1 penginapan Balqis. 2 unit tokoh kelontong. 1 tokoh alat tulis kantor, 3 unit sepeda motor 2 unit mobil. Tidak ada korban dalam kebakaran ini tetapi kerugian yang disebabkan karena kebakaran ini mencapai Rp 7 miliar.

Mengenai penyebab kebakaran tersebut diduga kuat akibat Korsleting Listrik. Pemadaman api melibatkan banyak pihak mulai dari personil pemadam

kebakaran dari Kabupaten Malinau, TNI AD, Instansi pemerintah setempat , Kepolisian dan Masyarakat. Pak Karyadi menambahkan bawa pemadaman api sulit dilakukan karena adanya toko sembako dan toko pakaian serta pengaruh asap tebal yang sulit ditembus jika tidak menggunakan masker.⁵⁹

Kasus ini Langsung ditindak Lanjuti oleh aparat kepolisian tetapi karena awamnya kesadaran masyarakat Lumbis maka korban kebakaran terlebih melakukan Mediasi bersama Pak agus dan pihak perwakilan korban kebakaran dan ternyata tahap mediasi mencapai kesepakatan dan diterima oleh kedua belah pihak dengan ganti kerugian. Hal ini wajar saja kata aparat Kepolisian karena korban kebakaran juga menerima hasil mediasi tersebut. Padahal Kasus ini sudah jelas adalah Culpa atau kelalain karena penulis bercermin dengan pengertian culpa sebagai berikut :

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan menggunakan ingatannya secara salah seharusnya dia menggunakan pikirannya dengan baik agar tidak melakukan kesalahan tetapi pelaku kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan dari apa yang dilarang. sehingga melakukan perbuatan tersebut.
2. Sebenarnya pelaku bisa memperkirakan akibat yang akan timbul tetapi pelaku lebih memilih melanjutkan perbuatannya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi setelahnya. Karena perbuatan yang dilakukannya tersebut pelaku kemudian dicela karena berbuat hal yang melawan hukum.

⁵⁹ Iptu M Karyadi, Kabupaten Nunukan, Wawancara, Nunukan, 15 Maret 2020

Masyarakat Indonesia dianggap mengerti dan mengetahui keekstensian Undang-undang dan peraturan yang telah berlaku, jadi setiap orang yang mampu dan bisa memberi pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat dalam hal ini yang termaksud dalam konteks pidana. Jadi tidak ada alasan seseorang bahwa seseorang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan dan diancam sanksi pidana atas apa yang telah ia lakukan.

Menurut Penulis penyelesaian masalah dalam hal menggunakan mediasi pada kasus ini sebenarnya tidak cukup memuaskan perihal hanya ganti rugi dan tidak mendapatkan sanksi yang ada pasal 188. Apalagi ini jelas tindak Pidana Culpa atau kelalaian dengan bercermin dari pengertian culpa itu sendiri yaitu pertama dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan menggunakan ingatannya secara salah seharusnya dia menggunakan pikirannya dengan baik agar tidak melakukan kesalahan tetapi pelaku kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan dari apa yang dilarang, sehingga melakukan perbuatan tersebut, dan yang kedua sebenarnya pelaku bisa memperkirakan akibat yang akan timbul tetapi pelaku lebih memilih melanjutkan perbuatannya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi setelahnya. Karena perbuatan yang dilakukannya tersebut pelaku kemudian dicela karena berbuat hal yang melawan hukum.

Seringkali Penulis Kutip yaitu Indonesia adalah negara hukum, yang dimana segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat maupun individu, itu semua diatur oleh hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka dari itu untuk menjalankan suatu Negara dan untuk melindungi Hak asasi

Manusia harus berdasarkan hukum, karena segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia sudah ada hukum yang mengaturnya sehingga perilaku masyarakat dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Tetapi karena tidak pahamnya suatu wilayah masyarakat membuat delik Culpa dipandang dengan kesalahan yang tidak perlu untuk dituntut dengan pasal 188. Maka dari itu perlunya pemerintah lebih mensosialisasikan hal-hal seperti ini supaya masyarakat juga menjadi paham mengenai Undang-undang di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah selesainya penyusunan materi skirpsi ini, maka dapat dikemukakan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pasal 188 tentang kebakaran baik kebakaran terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja tetap pelaku tindak pidana harus dijera hukuman yang sudah diatur karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran tetap akan dituntut pidana dengan pasal 188. Dengan pasal di atas dapat kita simpulkan bahwa delik *Culpa* sangat jelas dimata hukum pidana penjara adalah sanksi dari tindak pidana *Culpa*, tetapi masyarakat Kecamatan Lumbis tidak tahu apa itu *Cupla* atau Kelalaian mereka hanya berfikir ini hanyalah sebuah kecelakaan dirumah seorang warga Desa Mansalong Kecamatan Lumbis yang bernama Agus Salim dan diselesaikan dengan mediasi dan anti kerugian.
2. Pertimbangan kepolisian dalam hal ini juga hanya mengikuti masyarakat yang terkena kebakaran. Kerena semua keputusan dipegang oleh korban kebakaran, kepolisian hanya mengikuti Intruksi dan membantu mengkondusifkan kasus ini. Mengawal dari awal sampai akhir masalah dan memberi semangat bagi korban kebakaran. Pihak aparat kepolisian juga sangat berkontribusi

banyak dalam masyarakat ini, walaupun pihak kepolisian mengetahui akibat dari kelalaian tapi pihak kepolisian hanya bisa membuka pola pikir tapi tidak dengan memutuskan kasus ini..jadi sebenarnya kealpaan ini sama sekali tidak ada unsur sengaja ataupun niat untuk melakukan tindak pidana yang melanggar hukum tersebut. Tetapi, pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak berhati-hati dalam bertindak, sehingga harus tetap dipersalahkan atas apa yang diperbuatnya. Hal inilah yang menjadikan seseorang harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jadi tidak ada alasan seseorang bahwa seseorang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan dan diancam sanksi pidana atas apa yang telah ia lakukan.

C. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mensosialisasikan Tindak Pidana Culpa atau kelalaian pada masyarakat Kabupaten Nunukan tentang apa itu Tindak Pidana Culpa serta ciri-cirinya dan bagaimana Tindak Pidana Culpa bisa terjadi, agar pemerintah Kabupaten Nunukan Lebih berhati-hati serta mengawasi arus listrik di setiap kecamatan, sehingga dapat ditindak lanjuti lebih dini sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Diharapkan agar pemerintah Kecamatan Lumbis lebih memperhatikan korban yang terkena kebakaran untuk dibantu

perekonomian, ini juga adalah salah satu keinginan masyarakat kecamatan Lumbis terkhusus Desa Mansalong. Diharapkan agar aparat kepolisian lebih tegas dan transparan dalam menindak lanjuti kasus-kasus yang kurang diketahui oleh masyarakat sekitar. Serta diharapkan kepada masyarakat untuk lebih terbuka pikirannya akan hukum. Karena semua tindak pidana di Indonesia mempunyai Undang-undang yang jelas apalagi tindak pidana yang melibatkan kegiatan sangat banyak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. IX;
Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. "*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*". Jakarta:
Rajawali Pers, 2015.

Asyhadie Zaeni, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada,
2016

Arrasjid Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum cetakan kedua*, Jakarta : Sinar Grafika,
2001.

Arief Nawawi Badra, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT.
Citra. Aditya Bakri, 2003.

E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Tiara Ltd, 1998.

Effendi Jonaedi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana,
2015.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Jayadi, A. Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya. *Al-risalah Jurnal Ilmu
Syariah dan Hukum*, 2017

Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya
Bakti, 1984.

Lamintang dan Theo lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Rodliyah dan Salim. "*Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*". Depok: Rajawali Pers, 2017.

Santoso Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016.

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992.

Syahani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Aditya Bakti, 1999.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-undang Pidana, Jurnal*.

Syamsuddin, Rahman. dan Ismail Aris, S.H. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.

SUMBER LAINNYA:

Aniah, Ilham. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara”. (Analisis Putusan No. 1508/Pid.B/2012/PN.Mks), h. 65.

Arfandi, Muhammad Arnan. “Tinjauan Yuridis Atas Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain”. (Analisis Putusan: No.472/pid.B/2015/PN.Mks), h. 23.

Tobing, Letezia. ”*Ulasan lengkap: Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran*”.

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945

Kementrian Agama Republik Indonesia, AL-QUR’AN AL-KARIM (Jakarta : CV Darus Sunnah,2015)

<https://m.hukumonline.com>, 08 Desember 2019.



LAMPIRAN



Wawancara dengan Pak Jamiat Lurah Kecamatan Lumbis



Wawancara dengan Bendaha Kecamatan Lumbis dan juga Korban Kebakaran



Wawancara dengan Pak Idrus staf Kecamatan Lumbis



Wawancara dengan Pihak Kepolisian



Evakuasi Kebakaran kec.Lumbis Kab.Nunukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ANDI ASTI SAKINA CAHYANI, Lahir di Bone pada tanggal 18 April 1998, Anak ke 3 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Andi Muhammad Takwa dan Andi Nurmayanti. Penulis tinggal di RT 012, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan.

Pendidikan penulis dimulai di tingkat Sekolah Dasar di SDN No 263 Awang Tangka pada tahun 2004-2010, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Sei Menggaris pada tahun 2010-2013 dan selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 8 Bone pada tahun 2013-2016.

Pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana melalui Jalur SPAN-PTKIN, Penulis Menyelesaikan Studi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dengan lama studi 3 tahun 11 bulan 16 hari dengan Predikat Cumlaude.

Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“Penerapan Teori Culpability Terhadap Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan”**. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya.

